

Implementation Of Stunting Prevention Program in Sumorame Village Implementasi Program Pencegahan Stunting di Desa Sumorame

Riska Putmala Sari¹⁾, Isnaini Rodiyah ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: isnainirodiyah@umsida.ac.id

Abstract. *This study analyzes the implementation of stunting prevention programs in Sumorame Village, Sidoarjo, using Merilee S. Grindle's policy implementation theory. A qualitative approach was applied through observation, in-depth interviews, and documentation to obtain comprehensive data. Stunting, caused by chronic malnutrition, disrupts children's physical and cognitive development. The findings indicate that programs such as locally sourced supplementary feeding (PMT), nutrition counseling, and assistance for pregnant women have been implemented. However, several challenges persist, including limited trained health workers, inadequate program socialization, and low community participation, which reduce program effectiveness. The study highlights the need for stronger cross-sector collaboration, continuous nutrition education, and improved coordination among government institutions, community members, and related organizations. Effective and structured policy implementation, supported by sufficient resources, is essential to ensure the sustainability of stunting prevention efforts and to achieve significant reductions in stunting rates in the village.*

Keywords - implementation; stunting; sector collaboration

Abstrak. *Penelitian ini menganalisis implementasi program pencegahan stunting di Desa Sumorame, Sidoarjo, menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Pendekatan kualitatif diterapkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang komprehensif. Stunting, yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis, mengganggu perkembangan fisik dan kognitif anak. Temuan menunjukkan bahwa program-program seperti pemberian makanan tambahan yang bersumber dari lokal (PMT), konseling gizi, dan bantuan untuk ibu hamil telah diimplementasikan. Namun, beberapa tantangan masih ada, termasuk keterbatasan tenaga kesehatan terlatih, sosialisasi program yang tidak memadai, dan partisipasi masyarakat yang rendah, yang mengurangi efektivitas program. Studi ini menyoroti perlunya kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat, pendidikan gizi berkelanjutan, dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah, anggota masyarakat, dan organisasi terkait. Implementasi kebijakan yang efektif dan terstruktur, yang didukung oleh sumber daya yang cukup, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan upaya pencegahan stunting dan untuk mencapai pengurangan yang signifikan dalam angka stunting di desa tersebut.*

Kata Kunci - implementasi; stunting; kolaborasi sektor

I. PENDAHULUAN

Masalah gizi merupakan salah satu tantangan kesehatan masyarakat yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Gizi yang tidak seimbang baik kekurangan maupun kelebihan dapat berdampak negatif pada kualitas hidup dan kesehatan seseorang terutama balita. Salah satu masalah gizi yang dihadapi oleh balita saat ini adalah stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi dibawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Balita pendek (*stunted*) dan sangat pendek (*severely stunted*) adalah balita dengan panjang badan (PB/U) atau tinggi badan (TB/U) menurut umurnya dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS (*Multicentre Growth Reference Study*) 2006. Sedangkan definisi stunting menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) adalah anak balita dengan nilai z-scorenya kurang dari -2SD/standar deviasi (*stunted*) dan kurang dari -3SD (*severely stunted*) [1]. Stunting terjadi karena kekurangan nutrisi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga pada kemampuan kognitif dan produktivitas di masa depan. Oleh karena itu, pencegahan stunting merupakan investasi jangka panjang yang penting bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi menyebutkan “bahwa meningkatnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif merupakan komitmen global dan merupakan aset yang sangat berharga bagi bangsa dan negara Indonesia, bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif diperlukan status gizi yang optimal, dengan cara melakukan perbaikan gizi secara terus menerus”. Permasalahan Gizi ialah permasalahan dalam siklus kehidupan yang sangat

kompleks dan penting untuk segera ditangani hal ini dapat terjadi mulai dari bayi masih dalam kandungan, balita, remaja, bahkan sampai dengan lanjut usia. Masalah gizi dapat terjadi pada seluruh kelompok umur, permasalahan gizi pada satu kelompok umur tertentu akan berpengaruh pada status gizi pada periode siklus kehidupan berikutnya [2].

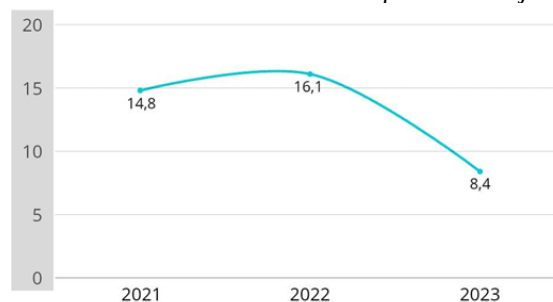
Di Indonesia, prevalensi stunting masih menjadi tantangan besar. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia mencapai 24,4% pada tahun 2022. Angka ini jauh di atas ambang batas yang ditetapkan oleh WHO, yaitu 20%. Stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan anak, tetapi juga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Anak-anak yang mengalami stunting cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan jangka panjang, seperti obesitas dan penyakit tidak menular, serta memiliki potensi produktivitas yang lebih rendah saat dewasa [3].

Pencegahan stunting menjadi prioritas utama dalam agenda kesehatan masyarakat di Indonesia. Berbagai program telah dicanangkan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah, seperti program pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, dan peningkatan akses layanan kesehatan [4]. Namun, meskipun banyak program yang telah dilaksanakan, hasil yang diperoleh belum sepenuhnya memuaskan. Beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi, pola makan yang tidak sehat, dan akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan, menjadi kendala dalam upaya pencegahan stunting.

Peraturan Kemenkes terkait stunting adalah Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 yang berisi Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Peraturan ini merupakan pengganti Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Perpres ini merupakan program prioritas pemerintah untuk menurunkan angka prevalensi stunting menjadi 14% pada akhir tahun 2024. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan [5]. Peraturan juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target penurunan stunting sebagai bagian dari *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Gambar 1. Capaian Prevalensi Stunting di Kabupaten Sidoarjo

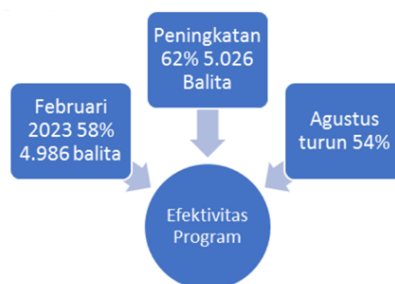
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo



Kabupaten Sidoarjo, sebagai salah satu wilayah yang padat penduduk dan dengan beragam potensi ekonomi, menghadapi tantangan dalam penanganan stunting. Dilihat dari gambar 1 tersebut, data prevalensi stunting di Kabupaten Sidoarjo turun signifikan dari tahun 2022 sebesar 16,1% dan tahun 2023 sebesar 8,4% [6]. Faktor-faktor seperti pola makan yang tidak seimbang, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan menjadi pemicu utama tingginya angka stunting di daerah ini. Data stunting di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan penurunan yang signifikan pada tahun 2023. Pada Februari 2023, angka stunting mencapai 5,3%, dengan 4.986 balita terindikasi stunting [7]. Berdasarkan data Sistem Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, kasus stunting di Sidoarjo turun menjadi 8,4%, secara rinci dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Kondisi Stunting di Sidoarjo

Sumber: Peneliti Penurunan Stunting Tahun 2024



Penurunan ini tidak lepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Salah satu langkah utama adalah memberikan bantuan peningkatan gizi kepada 20.299 kepala keluarga kategori Keluarga Rawan Stunting [8]. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam upaya menurunkan angka stunting di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengimplementasikan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satu langkah utama adalah memberikan bantuan peningkatan gizi kepada 20.299 kepala keluarga (KK) kategori keluarga rawan stunting (KRS) berupa makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal (mengandung protein dan karbohidrat) terutama pada balita. Program ini bertujuan untuk mengurangi prevalensi stunting secara signifikan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat setempat dan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta agar sadar akan pentingnya gizi seimbang dan pola makan yang sehat bagi balita, terutama pada seribu hari pertama kehidupan yang sangat krusial untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka. Program pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal ini bukan untuk menggantikan makanan utama. PMT diberikan setiap hari dengan komposisi sedikitnya 1 kali makanan lengkap dalam seminggu dan sisanya kudapan [9]. Makanan lengkap diberikan sebagai sarana edukasi implementasi isi piringku yang bergizi seimbang dengan mengutamakan 2 (dua) jenis sumber protein hewani. Sasaran dari PMT berbahan pangan lokal ini adalah balita gizi kurang, balita berat badan kurang dan balita dengan berat badan tidak naik, hal ini bertujuan agar berat badan balita kembali naik secara adekuat mengikuti kurva pertumbuhan. PMT berbahan pangan lokal ini dilakukan di Posyandu atau melalui kunjungan rumah oleh kader/nakes/mitra.

Perbaikan gizi juga menjadi prioritas utama. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk menyediakan makanan tambahan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan mereka. Selain itu, ada juga program pelatihan bagi tenaga kesehatan dan kader posyandu untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mendeteksi dan menangani kasus stunting. Pelatihan ini mencakup pengetahuan tentang gizi, kesehatan ibu dan anak, serta teknik-teknik intervensi yang efektif. Target pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah menurunkan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024 [7]. Meskipun tantangan masih ada, upaya yang terus-menerus dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam mengatasi masalah stunting di Sidoarjo.

Table 1. Data Program Kegiatan Pencegahan Stunting di Desa Sumorame

No	Program Kegiatan	Capaian Program
1	Pemberian makanan tambahan (PMT) lokal pada balita	85%
2	Pemberian asupan gizi tambahan pada ibu hamil	80%
3	Pendampingan ibu hamil kurang energi kronis	80%
4	Penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak	75%
5	Pendidikan dan penyuluhan kesehatan	70%
6	Pendampingan catin dan Kunjungan Rumah	65%

Sumber: Sekretaris PKK Desa Sumorame

Dilihat dari tabel diatas, Desa Sumorame telah mengimplementasikan program pencegahan stunting secara berkelanjutan dalam rangka enurunkan angka stunting. Namun, dari beberapa jenis program kegiatan tersebut, implementasi program belum berjalan secara maksimal dikarenakan beberapa faktor. Pertama, kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih seperti SDM kader yang kurang mumpuni di era integrasi layanan primer (ILP). Kedua, pemberian makanan tambahan (PMT) di setiap pos posyandu kurang menerapkan B2SA (Beragam, Bergizi,

Seimbang, dan Aman). Ketiga, sasaran belum mencakup karena kurangnya sosialisasi dari kader posyandu. Keempat, kebiasaan terhadap pola makan khususnya ibu hamil dan balita yang masih kurang terjaga.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian dilakukan menggunakan teori model implementasi Merilee S. Grindle yang merujuk pada variabel isi kebijakan (*Context of Policy*). Menurut (Grindle: 1980) implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dilakukan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Implementasi kebijakan berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut [10]. Dalam variabel isi kebijakan dibagi dalam 6 indikator, yaitu 1) Kepentingan kelompok sasaran, 2) Tipe manfaat, 3) Tingkat perubahan yang diinginkan, 4) Letak pengambilan keputusan, 5) Pelaksanaan program, dan 6) Sumber daya yang dilibatkan [11].

Penelitian yang akan dilakukan terkait implementasi program pencegahan stunting ini didasarkan pada beberapa penelitian terdahulu: pertama, dari peneliti Ivan Rasyad, Ika Devy Pramudiana dan Sri Kamariyah mengkaji implementasi penggunaan dana desa pada program *Stunting* di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi artikel ini berfokus pada pengidentifikasian dan analisis implementasi penggunaan dana desa terhadap program pencegahan stunting di Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis terhadap implementasi dana desa di Desa Kemiri untuk mencegah dan mengatasi stunting melibatkan berbagai langkah dari kepala desa, bidan desa, kader Posyandu, dan masyarakat setempat. Kepala desa telah menetapkan struktur administrasi dan memberikan kewenangan yang diperlukan, meskipun masih terdapat kendala terkait pola audit hasil yang belum rapi, sekitar 70% dari tugas-tugas ini telah berhasil dijalankan. Bidan desa dan kader Posyandu melakukan kegiatan penyuluhan sesuai dengan SOP, namun menghadapi kendala sumber daya manusia yang ahli, dengan tingkat keberhasilan sekitar 60% [12].

Kedua, dari peneliti Athifa, Zahwa, dan Amelia yang berjudul “Implementasi Program Pencegahan Stunting di Puskesmas Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare Tahun 2023” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik *purposive sampling* untuk mengkaji implementasi program pencegahan stunting dengan fokus pada perilaku birokrasi dan respons masyarakat yang melibatkan informan dari kepala puskesmas, nutrisisionis, dan tenaga kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa puskesmas Lapadde telah melaksanakan program pencegahan stunting dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam distribusi dan edukasi kepada masyarakat [13].

Ketiga, dari peneliti Dewi, Lusiana, dan Heri yang berjudul “Implementasi program pencegahan stunting di puskesmas Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara” Jurnal ini membahas implementasi program pencegahan stunting di Puskesmas Dolok Sigompulon. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik *purposive sampling* untuk pemilihan informan. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi, yang memberikan data komprehensif mengenai implementasi program. Informan terdiri dari petugas kesehatan dan ibu balita penderita stunting, yang membantu menggali informasi dari berbagai perspektif [14].

Dari gambaran permasalahan yang dijelaskan, maka tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi sudah berjalan baik, namun sosialisasi kepada masyarakat masih kurang optimal, mengakibatkan beberapa warga tidak memahami pentingnya pencegahan stunting serta pendampingan atau kunjungan rumah harus dilakukan secara berkelanjutan agar angka stunting terus berkurang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Yusanto (2019) menerangkan bahwa penelitian kualitatif memiliki ragam pendekatannya tersendiri, sehingga para peneliti dapat memilih dari ragam tersebut untuk menyesuaikan objek yang akan ditelitinya [15]. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat menggali dan menginterpretasikan informasi secara mendalam terkait program-program yang dijalankan untuk pencegahan *stunting*. Lokasi penelitian ini di Desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, lokasi yang dipilih berdasarkan intervensi yang berjalan karena sudah menjalankan beberapa program pencegahan stunting meskipun belum berjalan secara maksimal serta adanya dukungan dari pemerintah desa dalam pelaksanaan program. Penelitian ini berfokus pada implementasi program pencegahan *stunting* di Desa Sumorame. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* untuk menentukan informan dari Kader Posyandu, Bidan Desa, dan Kasi Kesejahteraan Desa. Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan yang digunakan dalam penelitian [16]. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data menjadi catatan lapangan dalam penelitian. Tahap pengumpulan data dibagi menjadi 3, yakni 1) Reduksi data dengan cara menyederhanakan, memfokuskan, dan memilih data yang sesuai dengan tujuan penelitian. 2) Penyajian data dengan cara menyusun dan menampilkan hasil secara sistematis agar mudah dipahami berupa table, grafik, atau narasi.

3) Penarikan kesimpulan dengan membuat narasi deskriptif yang menggambarkan hasil analisis data secara rinci dan logis dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi [17].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan yang terarah sehingga ada akhirnya akan mendapat suatu hasil dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri (Menurut Grindlee dalam Harbani Paslong 2009:645)[18]

A. Kepentingan Kelompok Sasaran

Menurut Merilee S. Grindle, kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* adalah salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan [19]. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan Stunting menyebutkan pentingnya penguatan program pencegahan stunting di tingkat pusat dan daerah untuk mengatur tentang penetapan kelompok sasaran yang perlu mendapat perhatian khusus, seperti anak balita dan ibu hamil yang harus dilakukan secara cepat dan akurat, serta melibatkan kerjasama lintas sektor, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Peraturan Kementerian Kesehatan dan kebijakan terkait menunjukkan komitmen pemerintah dalam menanggulangi masalah stunting di Indonesia. Melalui pendekatan yang terintegrasi dan partisipatif, diharapkan prevalensi stunting dapat diturunkan secara signifikan dalam waktu dekat[20].

Implementasi program pencegahan stunting di Desa Sumorame menunjukkan hasil yang berkelanjutan. Melalui peningkatan kebutuhan gizi dan akses layanan kesehatan yang baik, program ini telah berhasil mengurangi prevalensi stunting di desa. Implementasi program pencegahan stunting di Desa Sumorame selama satu tahun terakhir menunjukkan beberapa hasil yang signifikan. Hasil survei menunjukkan bahwa 75% anak-anak di bawah usia 5 tahun di Desa Sumorame kini mendapatkan asupan gizi yang sesuai dengan standar yang direkomendasikan, meningkat dari 50% sebelum pelaksanaan program (Sumber Bidan Desa Sumorame).

Dilihat dari indikator kelompok sasaran terkait kebutuhan gizi di Desa Sumorame kebutuhan gizi terutama balita belum terpenuhi secara maksimal dikarenakan kurangnya pengetahuan orang tua akan nutrisi dan gizi seimbang. Hal ini diperkuat oleh informan Bidan Desa Sumorame yang menyatakan *“Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami akan pentingnya gizi seimbang tetapi setelah adanya program penyuluhan gizi, banyak masyarakat yang sudah merubah pola makan agar kebutuhan gizi bisa terpenuhi terutama pada balita”*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa sebelumnya banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya gizi seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Ketidaktahuan ini berdampak pada pola makan yang kurang sehat dan kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi, terutama pada kelompok rentan seperti balita. Namun, setelah adanya program penyuluhan gizi, terjadi peningkatan kesadaran di kalangan masyarakat. Program ini berhasil memberikan edukasi yang mendorong masyarakat untuk mengubah pola makan mereka agar kebutuhan gizi dapat terpenuhi dengan lebih baik. Perubahan positif ini menunjukkan bahwa penyuluhan gizi efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong perilaku hidup sehat yang memberikan dampak baik bagi kesehatan terutama bagi generasi muda.

Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang dan praktik pemberian makanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya nutrisi bagi pertumbuhan anak. Kebutuhan gizi balita, terutama pada usia 1-5 tahun, sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, kebutuhan gizi harian untuk balita usia 1-3 tahun adalah energi: 1350 kkal, protein: 20 gram, karbohidrat: 215 gram, lemak: 45 gram, serat: 19 gram, dan air: 1150 ml. Sementara untuk balita usia 4-5 tahun, kebutuhan gizi harian meliputi energi: 1400 kkal, protein: 25 gram, karbohidrat: 220 gram, lemak: 50 gram, serat: 20 gram, dan air: 1450 ml. Kekurangan gizi dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak, sehingga penting untuk memantau dan memastikan kebutuhan gizi mereka terpenuhi. Dalam hal ini, para kader posyandu memastikan bahwa pemberian makanan tambahan (PMT) mengandung karbohidrat, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang masih bervariasi. Banyak orang tua yang menyadari bahwa nutrisi berpengaruh besar terhadap pertumbuhan anak, tetapi pengetahuan tentang jenis makanan yang tepat dan cara penyajiannya seringkali kurang. Program penyuluhan gizi di Desa Sumorame dilakukan secara berkala dan berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola makan seimbang, dari 45% menjadi 80%. Kegiatan edukasi dan pemeriksaan kesehatan anak dilakukan setiap bulan dengan rata-rata partisipasi masyarakat mencapai 60%. Keterlibatan ini menunjukkan antusiasme masyarakat dalam mengikuti program. Survei menunjukkan bahwa 70% masyarakat memberikan umpan balik positif terhadap program yang dijalankan, menunjukkan komunikasi yang baik antara penyelenggara dan masyarakat (Sumber Bidan Desa Sumorame).

Kepentingan kelompok sasaran terkait dengan akses layanan kesehatan di Desa Sumorame menurut Bidan Desa Sumorame yang menyatakan *“Akses masyarakat terhadap layanan gizi dan konseling sangat berpengaruh dalam upaya pencegahan stunting. Dengan adanya layanan ini, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi yang benar*

tentang pola makan sehat dan asupan gizi yang tepat, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak. Selain itu, layanan konseling membantu mendeteksi risiko stunting lebih dini sehingga intervensi bisa dilakukan lebih cepat. Namun, efektivitasnya juga bergantung pada ketersediaan fasilitas, tenaga ahli, dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut"

Hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan gizi dan konseling memiliki peran penting dalam pencegahan stunting. Layanan tersebut memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pola makan sehat dan asupan gizi yang tepat, khususnya bagi ibu hamil dan anak-anak sebagai kelompok rentan. Selain itu, layanan konseling memungkinkan deteksi risiko stunting secara dini sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. Namun, keberhasilan layanan ini sangat bergantung pada ketersediaan fasilitas, tenaga ahli, serta kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan yang telah disediakan. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik untuk memastikan layanan ini dapat berjalan optimal dan memberikan dampak yang maksimal dalam mengurangi angka stunting.

Di Desa Sumorame, layanan gizi memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita, mengenai pentingnya asupan nutrisi yang seimbang. Edukasi ini membantu masyarakat memahami kebutuhan gizi harian anak, seperti protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral, yang mendukung pertumbuhan optimal. Layanan konseling di desa ini memungkinkan warga mendapatkan panduan yang spesifik dan personal sesuai kondisi kesehatan mereka. Dengan dukungan tenaga ahli, seperti ahli gizi atau kader kesehatan lokal, risiko stunting pada anak dapat dikenali lebih dini melalui pemantauan tumbuh kembang anak, misalnya berat badan dan tinggi badan yang tidak sesuai standar.

Keberadaan posyandu dan puskesmas pembantu di Desa Sumorame menjadi fasilitas utama dalam mendukung implementasi layanan ini. Intervensi seperti pemberian suplemen tambahan, pendampingan pola makan, dan perbaikan pola asuh dapat dilakukan tepat waktu dengan memanfaatkan layanan tersebut. Namun, keberhasilan program ini bergantung pada ketersediaan tenaga ahli yang kompeten dan fasilitas kesehatan yang memadai. Kesadaran masyarakat juga menjadi faktor penting. Meskipun layanan tersedia, jika masyarakat belum menyadari pentingnya layanan ini atau enggan memanfaatkannya, upaya pencegahan stunting dapat terhambat. Oleh karena itu, edukasi yang konsisten dan kampanye kesadaran perlu terus dilakukan agar masyarakat Desa Sumorame semakin memahami pentingnya layanan ini dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Indikator kepentingan kelompok sasaran memiliki dampak terhadap keberhasilan implementasi program pencegahan stunting di Desa Sumorame. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga dengan balita, tentang pentingnya asupan gizi seimbang. Edukasi melalui layanan gizi dan penyuluhan telah meningkatkan pola makan sehat masyarakat, yang tercermin dari peningkatan jumlah balita yang memenuhi standar gizi harian, dari 50% sebelum program menjadi 75% setelah program berjalan selama satu tahun.

Layanan konseling dan pemantauan tumbuh kembang anak melalui posyandu dan puskesmas membantu mendeteksi risiko stunting secara dini, memungkinkan intervensi tepat waktu seperti pemberian makanan tambahan, pendampingan pola makan, dan perbaikan pola asuh. Namun, keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga ahli yang kompeten, dan tingkat kesadaran masyarakat. Meski demikian, hasil survei menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pola makan seimbang, dari 45% menjadi 80%, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan program, dengan rata-rata partisipasi sebesar 60%. Keberhasilan program pencegahan stunting di Desa Sumorame menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama lintas sektor, transparansi, dan akuntabilitas. Edukasi yang konsisten dan kampanye kesadaran perlu terus dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dampak positif program, sehingga prevalensi stunting dapat diturunkan secara signifikan di masa mendatang.

Kondisi implementasi program pencegahan stunting di Desa Sumorame ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle, yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada dua aspek utama yaitu, *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks implementasi). Dalam konteks Desa Sumorame, *content of policy* terlihat jelas melalui program yang menargetkan kelompok rentan dengan pendekatan yang terstruktur, seperti layanan edukasi gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak. *Context of implementation* diwakili oleh faktor lokal, seperti ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga ahli, dan kesadaran masyarakat. Meskipun program ini berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola makan seimbang, dari 45% menjadi 80%, serta partisipasi masyarakat hingga rata-rata 60%, keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh faktor lain, seperti keterbatasan tenaga ahli dan fasilitas kesehatan. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama lintas sektor, transparansi, dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan, sebagaimana diusulkan oleh Grindle. Dengan edukasi yang konsisten dan kampanye kesadaran, keberlanjutan dampak positif program dapat terjaga, sehingga prevalensi stunting di Desa Sumorame dapat terus menurun secara signifikan. Berdasarkan hasil penelitian Athifa, Zahwa, dan Amelia yang menyatakan bahwa perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif maupun respon negatif yang diberikan oleh masyarakat kepada implementor terkait dengan kinerja yang dilakukan oleh pemerintah. Terdapat masyarakat yang antusias dalam melakukan pemeriksaan dan konseling ketika

ada dilakukan di posyandu setempat. Tetapi, beberapa masyarakat ada yang merespon negatif karena mereka kurang edukasi terhadap stunting sehingga mereka menganggap bahwa stunting ini adalah penyakit yang dapat menular sehingga mereka takut membawa anaknya [13].

B. Tipe Manfaat

Content of policy (isi kebijakan) berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang akan dilaksanakan [21]. Menurut teori implementasi Grindle, indikator tipe manfaat mengacu pada jenis-jenis dampak positif yang dihasilkan oleh implementasi suatu kebijakan atau program. Indikator ini mencerminkan manfaat yang dapat dirasakan oleh penerima kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Grindle menekankan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya diukur dari proses implementasinya, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang dihasilkan dan dirasakan oleh masyarakat [22]. Indikator ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan tidak hanya terlaksana sesuai rencana, tetapi juga membawa hasil nyata yang relevan dan signifikan bagi masyarakat.

Implementasi program pencegahan stunting di Desa Sumorame berhasil memberikan dampak signifikan melalui pelaksanaan dan evaluasi dari setiap kegiatan. Dilihat dari indikator tipe manfaat, implementasi program pencegahan stunting di Desa Sumorame berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi dampak positif yang dihasilkan oleh program terhadap masyarakat, khususnya dalam konteks kesehatan dan gizi. Salah satu indikator utama adalah peningkatan status gizi anak dan ibu hamil. Dalam konteks ini, informan Kader Posyandu menyatakan *“Status gizi anak dapat diukur melalui parameter antropometri, seperti berat badan dan tinggi badan, serta indeks massa tubuh (IMT) untuk ibu hamil.”*

Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan status gizi anak dan ibu hamil diukur melalui beberapa indikator yang terintegrasi dalam Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) yaitu, pertama imunisasi untuk memastikan bahwa anak mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal. Kedua, Makanan Pendamping ASI (MPASI) untuk menilai keberadaan MPASI yang sesuai untuk anak di atas 6 bulan. Dan ketiga, akses terhadap air minum layak dan sanitasi untuk memastikan bahwa keluarga memiliki akses ke air bersih dan sanitasi yang baik.

Program pencegahan stunting di Desa Sumorame juga memberikan manfaat tidak langsung yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga dalam jangka pendek melalui beberapa intervensi yang mendukung kestabilan ekonomi dan pengelolaan sumber daya keluarga. Informan Kasi Kesejahteraan Desa Sumorame menyatakan *“Salah satu cara kontribusi ini dapat terjadi dengan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemberian makan yang bergizi dan bagaimana memilih bahan makanan yang terjangkau namun bergizi.”*

Hasil tersebut menunjukkan adanya fokus program pencegahan stunting di Desa Sumorame pada aspek edukasi masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan langsung, tetapi juga pada pengembangan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri. Edukasi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya gizi seimbang, yang melibatkan pemahaman tentang bahan makanan lokal yang terjangkau dan memiliki kandungan gizi tinggi. Hal ini berdampak pada perubahan perilaku konsumsi masyarakat, di mana mereka lebih selektif dalam memilih bahan makanan yang tidak hanya murah tetapi juga bergizi, sehingga mampu memenuhi kebutuhan nutrisi anak dan ibu hamil. Dampak dari pendekatan edukasi ini terlihat dari peningkatan kesadaran keluarga untuk memprioritaskan anggaran rumah tangga pada pembelian bahan makanan sehat. Selain itu, keluarga juga mulai memahami pentingnya pengelolaan sumber daya dengan bijak, sehingga mampu mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam mencegah stunting, tetapi juga mendorong kesejahteraan ekonomi keluarga melalui pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Edukasi mengenai pentingnya gizi dan pengelolaan sumber daya merupakan salah satu strategi kunci dalam implementasi program pencegahan stunting di Desa Sumorame, yang memberikan manfaat langsung maupun jangka panjang bagi masyarakat.

Program pencegahan stunting di Desa Sumorame juga mempengaruhi perubahan perilaku sehat dan pola makan keluarga. Salah satu tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang, pentingnya pemberian ASI eksklusif, dan pemenuhan gizi anak sejak masa kehamilan. Dengan memberikan pelatihan dan penyuluhan mengenai pola makan yang sehat dan bergizi, program ini mendorong masyarakat untuk mengubah kebiasaan makan yang tidak sehat, seperti konsumsi makanan instan atau makanan dengan kandungan gizi rendah, menjadi lebih bergizi dan sesuai dengan kebutuhan anak dan ibu. Misalnya, keluarga diajarkan cara memasak makanan bergizi menggunakan bahan-bahan lokal yang lebih terjangkau. Selain itu, program ini juga dapat membantu masyarakat memahami pentingnya kebersihan dalam pengelolaan makanan dan sanitasi yang baik. Dampak langsung dari perubahan perilaku ini terlihat dalam peningkatan kualitas pola makan keluarga, yang tidak hanya berfokus pada konsumsi makanan yang cukup, tetapi juga makanan yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak yang optimal.

Dampak jangka panjang dari program pencegahan stunting terhadap kesehatan dan perkembangan anak sangat besar dan berkelanjutan. Dengan pemberian gizi yang lebih baik pada masa kehamilan dan masa pertumbuhan awal, anak-anak yang dibesarkan dengan pola makan yang sehat dan bergizi akan mengalami perkembangan fisik dan

kognitif yang optimal. Stunting yang dicegah sejak dini akan mengurangi risiko keterlambatan perkembangan motorik dan intelektual, serta meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit. Anak-anak yang tidak mengalami stunting lebih cenderung untuk tumbuh menjadi individu yang lebih sehat dan memiliki kemampuan belajar yang lebih baik, yang akan berkontribusi pada pencapaian akademik yang lebih tinggi dan kehidupan sosial yang lebih produktif di masa depan. Selain itu, pencegahan stunting dapat meminimalkan biaya perawatan kesehatan yang mungkin timbul akibat penyakit yang berhubungan dengan malnutrisi, yang pada gilirannya mengurangi beban ekonomi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik anak saat ini, tetapi juga pada pembangunan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap untuk berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi di masa depan.

Indikator tipe manfaat menunjukkan bahwa implementasi program pencegahan stunting di Desa Sumorame memberikan dampak positif yang signifikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, program ini berhasil meningkatkan status gizi anak dan ibu hamil melalui intervensi terintegrasi, seperti imunisasi lengkap, pemberian MPASI, serta peningkatan akses terhadap air minum layak dan sanitasi. Edukasi tentang pentingnya pola makan bergizi dan pengelolaan sumber daya juga mendorong perubahan perilaku konsumsi masyarakat, yang berdampak pada pengelolaan keuangan keluarga yang lebih efisien dan prioritas pada pemenuhan kebutuhan gizi.

Secara tidak langsung, program ini memberikan manfaat jangka panjang dengan menciptakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup sehat, baik melalui pola makan bergizi, kebiasaan sanitasi yang baik, maupun pengelolaan sumber daya yang bijak. Anak-anak yang tumbuh dengan pola makan sehat mengalami perkembangan fisik dan kognitif yang optimal, sehingga memiliki peluang untuk berkontribusi lebih besar pada kehidupan sosial dan ekonomi di masa depan. Dengan demikian, program pencegahan stunting di Desa Sumorame tidak hanya memenuhi indikator keberhasilan implementasi kebijakan, tetapi juga memberikan dampak yang relevan dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Hasil tersebut sejalan dengan teori implementasi Grindle yang menekankan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari proses implementasinya, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Indikator tipe manfaat dalam teori ini mencerminkan dampak positif yang dihasilkan oleh implementasi kebijakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti studi oleh Wulandari et al. (2021) menunjukkan bahwa intervensi yang mencakup penyuluhan pola makan dan pemberdayaan ekonomi keluarga mampu memberikan dampak positif pada pengelolaan keuangan rumah tangga [4], serupa dengan temuan di Desa Sumorame. Dengan demikian, implementasi program di Desa Sumorame tidak hanya mencerminkan keberhasilan dalam konteks lokal, tetapi juga mendukung validasi teori Grindle dan memperkuat temuan dalam penelitian terdahulu tentang pentingnya pendekatan holistik dalam pencegahan stunting.

C. Tingkat Perubahan yang Diinginkan

Setiap kebijakan memiliki target yang akan dan ingin dicapai. *Content of policy* (isi kebijakan) yang ingin dijelaskan adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki perubahanyang jelas [19]. Dalam teori implementasi Grindle, indikator target perubahan yang diinginkan merujuk pada hasil atau perubahan spesifik yang diharapkan terjadi sebagai akibat dari implementasi sebuah kebijakan atau program. Indikator ini menjadi tolok ukur untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang dijalankan telah mencapai tujuan utamanya dan sejauh mana dampaknya terhadap masyarakat atau kelompok sasaran. Grindle menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada proses pelaksanaannya, tetapi juga pada kejelasan dan pencapaian target perubahan yang diinginkan. Indikator ini penting karena memberikan arahan yang jelas bagi pelaksana kebijakan untuk fokus pada hasil akhir yang diinginkan. Selain itu, indikator target perubahan juga memungkinkan adanya evaluasi yang terukur untuk menilai keberhasilan dan efektivitas kebijakan dalam membawa dampak positif bagi masyarakat [23].

Strategi yang diterapkan dalam program pencegahan stunting di Desa Sumorame melibatkan beberapa pendekatan untuk memastikan pencapaian target yang terukur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini mencakup penetapan kebijakan yang jelas, alokasi sumber daya yang cukup, serta pengorganisasian kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Misalnya, pemberian pelatihan kepada petugas kesehatan dan kader posyandu, distribusi pangan bergizi kepada keluarga berisiko, dan edukasi kepada orang tua tentang pola makan yang sehat dapat dipraktikkan untuk mencapai penurunan angka stunting. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga dilakukan untuk mengukur efektivitas kegiatan dan mengidentifikasi masalah yang mungkin menghambat pencapaian target. Menurut Kasi Kesejahteraan Desa Sumorame yang menyatakan “*Dengan strategi yang terkoordinasi dengan baik, seperti kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat setempat, pencapaian target penurunan angka stunting dapat lebih terjamin dalam waktu yang telah ditetapkan.*”

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat setempat merupakan kunci utama keberhasilan program ini. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif, baik dalam hal tenaga, dana, maupun informasi. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan kebijakan dan pendanaan, LSM berkontribusi melalui edukasi dan

fasilitasi program, sementara masyarakat menjadi aktor utama dalam implementasi langsung di lapangan. Dengan adanya sinergi ini, program dapat dijalankan secara terarah dan komprehensif, mencakup intervensi kesehatan, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi. Strategi ini juga memastikan adanya pengawasan dan evaluasi yang lebih baik, sehingga target penurunan angka stunting dapat dicapai sesuai waktu yang telah ditetapkan. Kolaborasi lintas sektor ini tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

Perubahan perilaku yang diharapkan dari program ini antara lain adalah peningkatan pola makan yang lebih bergizi, termasuk konsumsi lebih banyak sayuran, buah-buahan, dan sumber protein, serta pengurangan konsumsi makanan olahan atau tidak bergizi. Masyarakat juga diharapkan akan lebih memperhatikan kesehatan anak-anak mereka dengan memastikan kebersihan dalam pengolahan makanan, serta menjaga kesehatan tubuh melalui kebiasaan cuci tangan yang benar sebelum makan. Sekretaris PKK Desa Sumorame menyatakan *“Selain itu, ada peningkatan kesadaran untuk rutin membawa anak ke posyandu dan mengikuti program imunisasi yang disarankan untuk menghindari infeksi yang dapat memperburuk kondisi stunting.”*

Hasil tersebut menunjukkan adanya perubahan perilaku positif di masyarakat Desa Sumorame sebagai hasil dari implementasi program pencegahan stunting. Kesadaran ini merupakan indikator keberhasilan edukasi dan penyuluhan yang diberikan dalam program, di mana orang tua semakin memahami pentingnya peran posyandu dan imunisasi dalam menjaga kesehatan anak. Rutin membawa anak ke posyandu memungkinkan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak secara berkala, sementara program imunisasi membantu melindungi anak dari penyakit yang dapat memperburuk status gizi dan kondisi kesehatan mereka. Perubahan perilaku ini tidak hanya mendukung upaya pencegahan stunting secara langsung, tetapi juga menciptakan pola hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan di masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kesadaran ini menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan keberhasilan program pencegahan stunting di Desa Sumorame.

Berdasarkan indikator tingkat perubahan yang diinginkan dalam teori implementasi Grindle menunjukkan bahwa program pencegahan stunting di Desa Sumorame telah membawa perubahan yang signifikan, baik dalam perilaku masyarakat maupun dalam pencapaian target kebijakan. Teori Grindle menekankan bahwa keberhasilan sebuah kebijakan terletak pada sejauh mana perubahan yang diinginkan tercapai, yang diwujudkan melalui indikator-indikator yang jelas dan terukur. Dalam konteks Desa Sumorame, perubahan yang diharapkan mencakup peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan anak melalui pola makan bergizi, kehadiran rutin di posyandu, serta kepatuhan terhadap program imunisasi. Perubahan ini didorong oleh berbagai intervensi strategis, seperti pelatihan untuk kader kesehatan, distribusi pangan bergizi kepada keluarga berisiko, dan edukasi masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat.

Keberhasilan program juga ditunjang oleh kolaborasi yang efektif antara pemerintah, LSM, dan masyarakat setempat. Pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan yang mendukung dan pendanaan yang memadai, sementara LSM berkontribusi dalam aspek fasilitasi dan edukasi, serta masyarakat menjadi pelaku utama dalam implementasi program di lapangan. Kolaborasi lintas sektor ini memastikan bahwa program tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mencapai perubahan yang berdampak nyata. Pendekatan ini mencakup berbagai kegiatan, seperti monitoring dan evaluasi rutin, yang bertujuan untuk memastikan bahwa target perubahan, seperti penurunan angka stunting, dapat dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan.

Selain itu, dampak dari program ini terlihat pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk memprioritaskan kesehatan anak. Sebagai contoh, orang tua semakin rutin membawa anak ke posyandu untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, serta lebih patuh dalam mengikuti jadwal imunisasi guna mencegah infeksi yang dapat memperburuk kondisi stunting. Perubahan ini mencerminkan keberhasilan penyuluhan yang dilakukan dalam program, di mana masyarakat mulai mengadopsi pola hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dampak lain yang signifikan adalah meningkatnya kesadaran mengenai kebersihan, seperti menjaga kebersihan makanan dan menerapkan kebiasaan cuci tangan sebelum makan.

Dengan adanya strategi yang terkoordinasi dan evaluasi yang berkelanjutan, program ini tidak hanya berhasil menciptakan perubahan perilaku di tingkat individu dan keluarga, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Perubahan ini menunjukkan bahwa program pencegahan stunting di Desa Sumorame telah memenuhi indikator keberhasilan dalam teori Grindle, dengan menghasilkan dampak positif yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori implementasi Grindle, yang menekankan pentingnya pencapaian target perubahan yang diinginkan melalui kebijakan. Dalam teori Grindle, indikator perubahan yang diinginkan adalah hasil atau dampak yang jelas dan terukur, yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan. Pada kasus program pencegahan stunting di Desa Sumorame, perubahan yang diinginkan tercapai melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pola makan bergizi, pengelolaan kesehatan anak melalui posyandu, dan kepatuhan terhadap program imunisasi. Keberhasilan ini dapat dipandang sebagai bukti bahwa implementasi kebijakan yang baik harus memiliki target perubahan yang jelas dan terukur, sebagaimana dijelaskan dalam teori Grindle. Program pencegahan stunting di Desa Sumorame telah menetapkan target perubahan yang jelas, seperti peningkatan pola

makan bergizi, akses terhadap pangan dan layanan kesehatan, serta perubahan perilaku masyarakat untuk mendukung pencegahan stunting. Strategi yang diterapkan melibatkan edukasi kepada masyarakat tentang pola makan sehat, distribusi pangan bergizi, peningkatan kapasitas posyandu, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan efektif. Perubahan yang diharapkan mencakup peningkatan konsumsi makanan bergizi seperti sayuran, buah-buahan, dan protein, serta pengurangan konsumsi makanan olahan yang tidak sehat. Selain itu, masyarakat didorong untuk lebih aktif dalam memanfaatkan layanan kesehatan, seperti imunisasi dan program posyandu, guna memastikan kesehatan anak-anak mereka terjaga dengan baik.

Selain itu, dampak positif yang terlihat dalam perubahan perilaku masyarakat, seperti peningkatan kesadaran untuk rutin membawa anak ke posyandu dan mengikuti program imunisasi, sejalan dengan teori Grindle yang menyatakan bahwa perubahan yang diinginkan harus tercermin dalam perilaku masyarakat. Perubahan perilaku ini, seperti yang dijelaskan dalam penelitian oleh Wijaya et al. (2021), juga menunjukkan bahwa edukasi dan penyuluhan yang dilakukan secara berkelanjutan berperan besar dalam mengubah kebiasaan masyarakat. Hal ini mendukung teori bahwa program dengan hasil yang terukur, seperti penurunan angka stunting, akan lebih berhasil jika didukung oleh edukasi dan kesadaran masyarakat yang terus meningkat. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa program pencegahan stunting di Desa Sumorame tidak hanya mencapai target kebijakan yang diinginkan, tetapi juga menciptakan perubahan jangka panjang dalam pola hidup masyarakat, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dalam teori implementasi Grindle. Dengan adanya kolaborasi yang efektif dan evaluasi rutin, program ini memenuhi indikator keberhasilan yang diharapkan, sekaligus memberikan dampak positif yang berkelanjutan dalam mengurangi prevalensi stunting di daerah tersebut [24].

D. Letak Pengambilan Keputusan

Grindle (1980: 6-10) Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat [25]. Menurut teori implementasi Merilee S. Grindle, pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh 2 elemen utama yaitu, struktur organisasi dan transparansi. Kedua elemen ini berperan dalam mengarahkan bagaimana program dijalankan di lapangan, serta sejauh mana masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam proses tersebut [26].

Program pencegahan stunting di Desa Sumorame melibatkan berbagai lembaga yang berperan penting dalam menanggulangi permasalahan ini, baik di tingkat lokal maupun regional. Di tingkat pusat, kementerian terkait seperti Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam merumuskan kebijakan nasional mengenai stunting. Sementara itu, di tingkat desa terdapat puskesmas dan posyandu memiliki peran utama dalam pelayanan kesehatan dan pemantauan status gizi anak. Pemerintah desa juga terlibat dalam menjalankan kebijakan lokal yang mendukung pencegahan stunting, melalui pemberian bantuan sosial atau subsidi pangan sehat untuk keluarga berisiko.

Menurut Kasi Kesejahteraan Desa Sumorame *“Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi komunitas sering kali turut terlibat dalam mendukung kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat tentang gizi, sanitasi, dan pola hidup sehat.”*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan peran penting Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi komunitas dalam mendukung implementasi program pencegahan stunting di Desa Sumorame. LSM dan organisasi komunitas berfungsi sebagai mitra strategis yang memperkuat upaya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam hal gizi, sanitasi, dan pola hidup sehat. Keterlibatan LSM dalam kegiatan ini tidak hanya terbatas pada penyuluhan, tetapi juga mencakup pendidikan masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan konsumsi makanan bergizi. Dengan peran aktif ini, LSM dan organisasi komunitas berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu kesehatan yang berhubungan dengan stunting. Hal ini sejalan dengan teori implementasi Grindle, yang menekankan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak dalam menciptakan keberhasilan kebijakan. Kolaborasi ini memungkinkan distribusi pengetahuan dan sumber daya yang lebih luas, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan.

Mekanisme koordinasi antara lembaga yang terlibat dalam implementasi program pencegahan stunting di Desa Sumorame terstruktur dengan baik agar seluruh pihak bekerja dengan sinergis dan efisien. Secara umum, koordinasi ini dapat dilakukan melalui, pertama, rapat koordinasi rutin antara puskesmas, kader posyandu, pemerintah desa, dan organisasi lainnya untuk membahas isu-isu terkait stunting serta perencanaan dan pelaksanaan program. Kedua, jaringan komunikasi berbasis teknologi, seperti grup *WhatsApp* atau platform komunikasi lainnya, dapat digunakan untuk mempermudah pertukaran informasi antara pihak-pihak yang terlibat. Ketiga, penguatan peran posyandu dalam koordinasi, di mana posyandu tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai pusat informasi dan komunikasi bagi keluarga terkait pencegahan stunting. Keempat, keterlibatan pihak desa dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi, dimana peran pemerintah desa sangat krusial dalam mendukung operasionalisasi program di lapangan, baik melalui alokasi anggaran maupun penyediaan sumber daya lainnya.

Fragmentasi dalam implementasi program sering terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan dalam pengelolaan dan pelaksanaan antara berbagai lembaga yang terlibat. Di Desa Sumorame menurut Bidan Desa, *“Fragmentasi dapat muncul jika ada perbedaan pemahaman atau tumpang tindih antara lembaga-lembaga yang menangani stunting. Misalnya, puskesmas dan posyandu mungkin memiliki data yang tidak saling terintegrasi mengenai status gizi anak-anak, atau kebijakan dari pemerintah desa yang tidak selaras dengan kebijakan nasional terkait pencegahan stunting.”*

Hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa fragmentasi dalam implementasi program pencegahan stunting di Desa Sumorame dapat terjadi akibat perbedaan pemahaman atau tumpang tindih antara lembaga-lembaga yang terlibat, seperti puskesmas, posyandu, dan pemerintah desa. Sebagai contoh, puskesmas dan posyandu mungkin memiliki data yang tidak terintegrasi dengan baik mengenai status gizi anak-anak, yang menghambat upaya pemantauan dan intervensi yang efektif. Selain itu, ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan di tingkat desa dengan kebijakan nasional terkait pencegahan stunting juga dapat menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan program yang harmonis. Fragmentasi semacam ini berpotensi mengurangi efektivitas kebijakan dan menghambat pencapaian tujuan utama pencegahan stunting. Hal ini menunjukkan pentingnya koordinasi yang lebih baik dan keselarasan antara berbagai lembaga dan kebijakan agar program dapat berjalan secara terpadu dan mencapai hasil yang optimal. Penyebab utama dari fragmentasi ini adalah pertama, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga yang terlibat dalam program. Kedua, birokrasi yang rumit atau perbedaan prosedur antara lembaga pemerintah dan LSM yang menyebabkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan program. Ketiga, keterbatasan sumber daya (baik dana maupun tenaga) di beberapa lembaga, yang menyebabkan kurangnya pelaksanaan intervensi secara efektif.

Beberapa langkah yang diambil oleh tim PKK Desa Sumorame antara lain: Pertama, pelatihan bersama untuk kader kesehatan, petugas puskesmas, dan pemerintah desa mengenai program pencegahan stunting, sehingga mereka memiliki pemahaman yang seragam dan dapat bekerja dengan tujuan yang sama. Kedua, membangun forum komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi dan pembahasan masalah secara langsung antara pihak-pihak terkait. Forum ini bisa berupa pertemuan bulanan atau kelompok diskusi yang melibatkan kader posyandu, kepala desa, dan petugas kesehatan. Ketiga, sistem pelaporan dan feedback yang terintegrasi, di mana laporan tentang status gizi anak-anak dan kegiatan pencegahan stunting dapat dilaporkan secara terstruktur dan transparan. Hal ini memungkinkan evaluasi yang lebih cepat dan tindak lanjut yang lebih tepat. Keempat, penyusunan rencana aksi bersama, di mana semua pemangku kepentingan membuat rencana yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing, serta mekanisme evaluasi bersama.

Penyampaian informasi yang jelas dan transparan mengenai kegiatan program pencegahan stunting sangat penting untuk memastikan keberhasilan implementasi. Mekanisme penyampaian informasi tersebut meliputi penyuluhan dan sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui pertemuan desa atau posyandu mengenai tujuan, prosedur, dan manfaat program pencegahan stunting. Distribusi materi edukasi (leaflet, poster, video, dll) yang menjelaskan tentang pentingnya gizi seimbang, pola makan sehat, dan perawatan kesehatan anak. Penggunaan media lokal seperti radio desa, papan pengumuman di balai desa, atau media sosial untuk menyebarluaskan informasi tentang program. Laporan berkala yang disampaikan kepada masyarakat mengenai progres program, hasil evaluasi, serta pencapaian target. Ini penting untuk memberikan akuntabilitas kepada masyarakat.

Indikator letak pengambilan keputusan yang efektif dalam kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi dan transparansi. Program ini melibatkan berbagai lembaga yang memiliki peran penting, baik di tingkat pusat, regional, maupun lokal. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat pusat bertanggung jawab merumuskan kebijakan nasional mengenai stunting, sementara di tingkat desa, puskesmas, posyandu, dan pemerintah desa berperan aktif dalam pelaksanaan program.

Koordinasi antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk mendukung implementasi yang efisien dan efektif. Hal ini terlihat dalam keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi komunitas dalam penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat tentang gizi, sanitasi, dan pola hidup sehat, yang memperkuat kesadaran masyarakat terhadap masalah stunting. Pengambilan keputusan yang tepat juga tercermin dari koordinasi yang terstruktur dengan baik antara puskesmas, kader posyandu, pemerintah desa, dan organisasi lainnya. Selain itu, penggunaan teknologi komunikasi untuk mempermudah pertukaran informasi menjadi langkah penting dalam memastikan semua pihak dapat bekerja secara sinergis. Namun, meskipun terdapat mekanisme koordinasi yang baik, masalah fragmentasi muncul akibat perbedaan pemahaman dan ketidaksesuaian data antara lembaga-lembaga yang terlibat. Ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah desa dan kebijakan nasional juga dapat menghambat pelaksanaan yang harmonis. Fragmentasi ini dapat mengurangi efektivitas kebijakan dan pencapaian tujuan pencegahan stunting. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan seperti pelatihan bersama, forum komunikasi, serta sistem pelaporan dan evaluasi yang terintegrasi sangat penting untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penyampaian informasi yang jelas dan transparan juga diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami tujuan dan manfaat program secara menyeluruh.

Hasil ini sejalan dengan teori implementasi Merilee S. Grindle transparansi dalam kebijakan terlihat dari keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan

organisasi komunitas, dalam kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan. Keterlibatan LSM ini memperkuat pengawasan dan partisipasi masyarakat, yang merupakan faktor kunci dalam mendukung kesuksesan implementasi kebijakan. Keterbukaan dalam penyampaian informasi terkait program dan kebijakan, serta penggunaan teknologi komunikasi untuk mempermudah koordinasi antar pihak terkait, juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas implementasi. Namun, dalam implementasi program pencegahan stunting ini, fragmentasi masih menjadi isu yang signifikan, sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan beberapa pihak di Desa Sumorame. Fragmentasi ini terjadi akibat perbedaan pemahaman antar lembaga dan ketidaksesuaian data serta kebijakan antara tingkat desa dan kebijakan nasional. Grindle (1980) menyarankan bahwa pengambilan keputusan yang terfragmentasi atau tidak terkoordinasi dengan baik dapat menghambat implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, fragmentasi yang terjadi di Desa Sumorame misalnya ketidaksesuaian data antara puskesmas dan posyandu atau kebijakan desa yang tidak selaras dengan kebijakan nasional dapat menurunkan efektivitas program pencegahan stunting.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kencana et al. (2020) dan Purnama (2019) juga menunjukkan bahwa masalah koordinasi antar lembaga dalam implementasi kebijakan kesehatan seringkali menjadi hambatan besar [27]. Keduanya menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas dan koordinasi yang efisien untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan fragmentasi dalam pelaksanaan program. Dalam hal ini, langkah-langkah perbaikan yang diambil oleh tim PKK Desa Sumorame, seperti pelatihan bersama, forum komunikasi rutin, dan sistem pelaporan yang terintegrasi, selaras dengan rekomendasi dari penelitian terdahulu yang mendorong peningkatan koordinasi dan transparansi untuk mengatasi fragmentasi. Secara keseluruhan, meskipun ada upaya yang cukup baik dalam koordinasi dan transparansi, masih terdapat tantangan terkait fragmentasi yang perlu diperbaiki agar program pencegahan stunting dapat berjalan secara lebih efektif dan terintegrasi.

E. Pelaksanaan Program

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci [28]. Teori implementasi Grindle menekankan pentingnya pengukuran terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program dengan menggunakan indikator tertentu. Dalam konteks teori implementasi Grindle, keberhasilan program ini bergantung pada sejauh mana komponen-komponen tersebut dirancang dan diadaptasi dengan situasi lokal [29].

Tahap awal implementasi program pencegahan stunting di Desa Sumorame dimulai dengan penyusunan jadwal kegiatan yang terstruktur seperti pada table.

Table 2 Program Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan Program
1	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal	Terlaksana
2	Penyuluhan gizi	Terlaksana
3	Pendampingan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	Terlaksana
4	Pendampingan calon pengantin	Tidak Terlaksana
5	Kunjungan rumah	Tidak Terlaksana

Sumber: Sekretaris PKK Desa Sumorame

Pernyataan informan Sekretaris PKK Desa Sumorame *“Beberapa kegiatan masih belum bisa dilaksanakan secara efektif karena terkendala waktu”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, ditemukan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan adalah masalah waktu. Responden menyatakan bahwa beberapa kegiatan dalam program tersebut belum dapat dilaksanakan

secara efektif karena keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para pelaksana maupun peserta program. Kendala ini dapat disebabkan oleh jadwal yang padat, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, atau prioritas waktu yang berbeda di antara masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan waktu dan perencanaan yang lebih terstruktur menjadi aspek penting untuk meningkatkan efektivitas program pencegahan stunting di desa tersebut. Partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam metode pelaksanaan program. Hal ini mencakup sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan posyandu serta metode yang diterapkan untuk meningkatkan partisipasi tersebut, seperti penyuluhan, pemberian insentif, atau pelibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan.

Sekretaris PKK Desa Sumorame menyatakan *“Dalam konteks jadwal kegiatan, evaluasi terhadap program dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana awal.”*

Hasil tersebut dalam konteks pelaksanaan program pencegahan stunting di Desa Sumorame, evaluasi terhadap jadwal kegiatan menjadi langkah penting untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana awal. Hal ini dilakukan untuk memantau pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan yang mungkin muncul, dan menyesuaikan strategi agar tujuan program dapat tercapai. Evaluasi ini juga menjadi alat untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat tetap mengikuti alur kerja yang telah ditetapkan, sehingga program dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat. Evaluasi ini melibatkan pengukuran terhadap pencapaian target waktu, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta kesesuaian aktivitas dengan sumber daya yang tersedia. Selain itu, fleksibilitas jadwal juga menjadi komponen penting dalam keberhasilan implementasi. Program yang dirancang dengan fleksibilitas yang memadai dapat lebih responsif terhadap kendala atau hambatan yang muncul selama pelaksanaannya. Misalnya, jika terdapat keterlambatan logistik atau perubahan kebutuhan masyarakat, jadwal yang fleksibel memungkinkan pengaturan ulang aktivitas tanpa mengganggu tujuan utama program. Pelibatan masyarakat menjadi elemen sentral dalam metode pelaksanaan program pencegahan stunting di Desa Sumorame. Keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari partisipasi aktif dalam kegiatan posyandu, baik sebagai peserta maupun kader. Kader posyandu, yang terdiri dari warga setempat, dilatih untuk memberikan informasi kesehatan, memantau tumbuh kembang anak, dan mendampingi ibu hamil dalam menjaga asupan gizi.

Menurut Sekretaris PKK Desa Sumorame, *“Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, berbagai pendekatan diterapkan. Pendekatan berbasis komunitas, seperti diskusi kelompok terarah (FGD) dengan ibu-ibu, dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi. Selain itu, penggunaan media lokal seperti poster, leaflet, dan pengeras suara desa dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi penting.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pencegahan stunting di Desa Sumorame, berbagai pendekatan strategis diterapkan. Pendekatan berbasis komunitas, seperti diskusi kelompok terarah (FGD) dengan kelompok ibu-ibu, digunakan untuk menggali kebutuhan serta tantangan spesifik yang dihadapi masyarakat. Melalui metode ini, program dapat disesuaikan dengan kondisi lokal dan lebih relevan bagi peserta. Selain itu, media lokal seperti poster, leaflet, dan pengeras suara desa dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi untuk menyebarkan informasi penting secara luas. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong keterlibatan aktif mereka dalam mendukung keberhasilan program. Program insentif juga diberlakukan, seperti pemberian paket makanan bergizi bagi keluarga yang aktif mengikuti posyandu, guna meningkatkan antusiasme masyarakat. Tidak kalah penting, keterlibatan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal menjadi strategi yang efektif untuk membangun kepercayaan dan komitmen komunitas. Tokoh masyarakat berperan sebagai fasilitator yang mampu menggerakkan warga untuk mendukung program dan menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari.

Metode pelaksanaan berfokus pada pendekatan yang diterapkan dalam menjalankan program, termasuk keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat, khususnya dalam kegiatan posyandu, menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan implementasi. Posyandu, sebagai program pelayanan kesehatan berbasis komunitas, memerlukan partisipasi aktif masyarakat untuk menjamin efektivitasnya. Partisipasi masyarakat dapat mencakup kehadiran dalam kegiatan, kontribusi dalam perencanaan, hingga peran aktif sebagai kader posyandu. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, metode yang diterapkan harus berbasis kebutuhan lokal dan partisipatif. Bidan Desa Sumorame menyatakan *“Misalnya, kegiatan penyuluhan kesehatan yang menggunakan pendekatan budaya setempat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya posyandu.”*

Kegiatan penyuluhan kesehatan yang memanfaatkan pendekatan budaya setempat terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya posyandu. Dengan menyesuaikan metode penyampaian informasi sesuai dengan nilai, tradisi, dan kebiasaan lokal, masyarakat lebih mudah menerima pesan yang disampaikan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam layanan kesehatan seperti posyandu, yang merupakan salah satu elemen penting dalam pencegahan stunting. Hal ini menunjukkan bahwa pelibatan aspek budaya lokal dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat implementasi program kesehatan di tingkat komunitas.

Berdasarkan indikator keberhasilan pelaksanaan program yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang terstruktur. Dalam program pencegahan stunting di Desa Sumorame, pelaksanaan kegiatan menunjukkan keberhasilan yang bervariasi berdasarkan indikator-indikator tersebut. Beberapa kegiatan, seperti

pemberian makanan tambahan lokal, penyuluhan gizi, dan pendampingan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), terlaksana sesuai rencana. Namun, kegiatan lain seperti pendampingan calon pengantin dan kunjungan rumah belum dapat dilaksanakan secara optimal akibat kendala waktu dan keterbatasan pelaksana. Indikator lain yang penting adalah partisipasi masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas, seperti diskusi kelompok terarah (FGD) dan penyuluhan kesehatan dengan pendekatan budaya lokal, menjadi metode yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Program juga memanfaatkan media lokal, seperti poster, leaflet, dan pengeras suara, untuk mendukung penyebaran informasi. Namun, partisipasi masyarakat sebagai peserta aktif dan kader dalam kegiatan posyandu perlu terus ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan program.

Evaluasi program menjadi indikator kunci dalam memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai jadwal dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Evaluasi melibatkan pengukuran pencapaian target waktu, efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta kesesuaian dengan sumber daya yang tersedia. Fleksibilitas dalam jadwal kegiatan juga menjadi komponen penting, memungkinkan penyesuaian terhadap kendala yang muncul tanpa mengganggu tujuan utama program. Dengan fokus pada indikator pelaksanaan ini, program diharapkan dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya untuk mencegah stunting.

Hal tersebut sejalan dengan teori implementasi Grindle yang menyebutkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program sangat dipengaruhi oleh perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang terstruktur. Dalam konteks program pencegahan stunting di Desa Sumorame, indikator pelaksanaan mencerminkan penerapan teori ini. Perencanaan yang terstruktur terlihat dari penyusunan kegiatan seperti pemberian makanan tambahan lokal, penyuluhan gizi, dan pendampingan ibu hamil KEK. Namun, pelaksanaan kegiatan seperti pendampingan calon pengantin dan kunjungan rumah terkendala oleh keterbatasan waktu dan sumber daya pelaksana, yang menunjukkan pentingnya pengelolaan operasional yang lebih baik untuk mencapai keberhasilan program.

Teori Grindle juga menekankan perlunya adaptasi program terhadap kondisi lokal, yang tercermin dalam pendekatan berbasis komunitas yang digunakan di Desa Sumorame. Pendekatan seperti diskusi kelompok terarah (FGD) dan penyuluhan berbasis budaya lokal efektif meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Evaluasi program sebagaimana disarankan oleh Grindle, menjadi komponen kunci dalam memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan tujuan program. Hal ini juga ditekankan dalam penelitian Handayani (2021), yang menunjukkan bahwa evaluasi yang berkelanjutan dapat mengidentifikasi hambatan dalam implementasi dan memungkinkan penyesuaian yang diperlukan [30]. Dalam kasus Desa Sumorame, evaluasi dilakukan untuk memantau keberhasilan program dan fleksibilitas jadwal menjadi salah satu aspek penting untuk mengatasi kendala seperti keterbatasan waktu dan perubahan kebutuhan masyarakat.

F. Sumber Daya

Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai agar pelaksanaannya berjalan dengan baik sesuai target yang diinginkan. Menurut teori Merilee S. Grindle, sumber daya merupakan salah satu variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik. Variabel kritis lainnya adalah komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, dan sikap dan komitmen dari pelaksana program [26]. Kader kesehatan merupakan ujung tombak program di lapangan. Mereka bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat, memantau status gizi balita, dan melaksanakan kegiatan seperti penimbangan berat badan dan distribusi makanan tambahan.

Di Desa Sumorame, kader juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, menyampaikan keluhan atau kebutuhan yang muncul. Efektivitas peran kader sangat dipengaruhi oleh pelatihan yang mereka terima, motivasi kerja, serta ketersediaan alat bantu seperti buku panduan atau aplikasi berbasis teknologi. Pemerintah desa memainkan peran penting sebagai koordinator dan fasilitator. Mereka menyediakan kebijakan yang mendukung, seperti alokasi dana desa untuk program kesehatan, serta memastikan sinergi antara berbagai pihak terkait.

Kasi Kesejahteraan Desa Sumorame menyatakan *“Pemerintah desa juga dapat memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program, baik melalui sosialisasi langsung maupun melalui dukungan tokoh masyarakat.”*

Berdasarkan pernyataan tersebut, dukungan berupa kebijakan proaktif ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberhasilan program terutama pada program PMT. Anggaran yang tersedia untuk program pencegahan stunting, terutama untuk kegiatan seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sudah mencukupi dan berkesinambungan. Alokasi anggaran juga diarahkan tidak hanya untuk kegiatan rutin tetapi juga untuk pelatihan kader, pembelian alat kesehatan, dan penyediaan bahan makanan bergizi. Agar program lebih berkelanjutan, diversifikasi sumber dana menjadi penting. Pemerintah desa menggandeng sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bekerja sama dengan lembaga donor atau memanfaatkan dana zakat dan infak dari masyarakat setempat. Diversifikasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber anggaran dan memastikan bahwa program dapat terus berjalan meskipun ada perubahan kebijakan atau keterbatasan dana di masa depan.

Informan Sekretaris PKK Desa Sumorame menyatakan *“Terkait penyediaan alat dan bahan untuk mendukung implementasi sudah sesuai dengan SOP.”*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyediaan alat dan bahan untuk mendukung implementasi program pencegahan stunting di Desa Sumorame telah dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa aspek logistik, sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan program, telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Kesesuaian dengan SOP menunjukkan adanya upaya untuk memastikan kualitas dan efisiensi dalam penyediaan sumber daya. Namun, efektivitas pemanfaatan alat dan bahan tersebut tetap bergantung pada kemampuan pelaksana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya tersebut secara optimal sesuai dengan kebutuhan program. Material yang diperlukan, seperti alat kesehatan (timbangan, alat ukur tinggi badan) dan bahan makanan bergizi untuk PMT juga sudah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan pengadaan material sudah direncanakan secara detail dan dievaluasi secara berkala.

Terdapat beberapa tantangan utama dalam implementasi program di Desa Sumorame untuk mengatasi tantangan ini, beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah pelatihan berkala untuk kader kesehatan agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan pemantauan yang ketat terhadap penggunaan material dan anggaran untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Keberhasilan program pencegahan stunting di Desa Sumorame bergantung pada pengelolaan sumber daya yang baik, termasuk sinergi antara kader kesehatan, pemerintah desa, dan masyarakat. Dengan dukungan kebijakan yang proaktif, diversifikasi sumber dana, dan evaluasi berkala, program ini diharapkan dapat berkelanjutan dan memberikan dampak positif dalam menurunkan prevalensi stunting di desa. Strategi yang diterapkan sejauh ini mencerminkan adaptasi lokal yang sesuai dengan teori Grindle dan praktik terbaik dari penelitian sebelumnya.

Sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk manusia, dana, maupun material, berperan penting dalam mencapai target program. Di Desa Sumorame, kader kesehatan menjadi ujung tombak pelaksanaan program, menjalankan berbagai tugas mulai dari edukasi masyarakat, pemantauan status gizi balita, hingga distribusi makanan tambahan. Efektivitas peran kader ini sangat dipengaruhi oleh pelatihan berkala, motivasi kerja, dan ketersediaan alat bantu yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Pemerintah desa berperan sebagai koordinator dan fasilitator dengan mendukung kebijakan, alokasi dana desa, dan mobilisasi masyarakat melalui tokoh lokal. Diversifikasi sumber dana dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan program dan mengurangi ketergantungan pada satu sumber anggaran. Penyediaan material seperti alat kesehatan dan bahan makanan bergizi untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) juga sudah sesuai SOP, dengan perencanaan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan dana tetap menjadi perhatian, sehingga pelatihan kader dan pemantauan transparansi penggunaan anggaran menjadi strategi utama yang diterapkan.

Berdasarkan indikator sumber daya, keberhasilan implementasi program bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang memadai. Di Desa Sumorame, sumber daya manusia, dana, dan material menjadi komponen penting dalam pelaksanaan program pencegahan stunting. Kader kesehatan, sebagai ujung tombak di lapangan, memainkan peran utama dalam memberikan edukasi, memantau status gizi balita, dan melaksanakan kegiatan seperti penimbangan dan pemberian makanan tambahan (PMT). Efektivitas kader dipengaruhi oleh pelatihan berkala, motivasi kerja, dan ketersediaan alat bantu yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Pemerintah desa mendukung keberhasilan program melalui kebijakan yang proaktif, alokasi dana desa, dan sinergi dengan tokoh masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat. Anggaran yang tersedia telah mencakup kebutuhan utama seperti pelatihan kader, pembelian alat kesehatan, dan penyediaan bahan makanan bergizi, serta dilengkapi dengan evaluasi berkala untuk menjaga kualitas dan efisiensi. Selain itu, pemerintah desa berinovasi dengan diversifikasi sumber dana melalui program CSR, donasi lembaga, dan zakat masyarakat, untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber anggaran dan memastikan keberlanjutan program.

Penyediaan material, seperti alat kesehatan (timbangan, alat ukur tinggi badan) dan bahan makanan bergizi untuk PMT, sudah sesuai dengan SOP. Perencanaan yang detail dan evaluasi berkala menunjukkan adanya komitmen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan dana tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi dengan penguatan pelatihan kader dan pengelolaan anggaran yang lebih ketat.

Hal tersebut sejalan dengan teori implementasi Grindle yang menekankan keberhasilan pelaksanaan suatu program sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan sumber daya yang memadai, yang mencakup sumber daya manusia, dana, dan material. Dalam konteks program pencegahan stunting di Desa Sumorame, sumber daya manusia, khususnya kader kesehatan, memainkan peran utama dalam pelaksanaan program. Kader kesehatan bertanggung jawab untuk memberikan edukasi, memantau status gizi balita, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti penimbangan dan pemberian makanan tambahan (PMT). Efektivitas kader ini sangat dipengaruhi oleh pelatihan yang mereka terima, motivasi kerja, serta ketersediaan alat bantu yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP).

Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam pengelolaan sumber daya, termasuk alokasi dana desa untuk mendukung kegiatan program. Dana ini digunakan untuk pelatihan kader, pembelian alat kesehatan, dan penyediaan bahan makanan bergizi. Keberhasilan program juga dipengaruhi oleh adanya kebijakan yang mendukung serta sinergi dengan tokoh masyarakat dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Sejalan dengan teori

Grindle, komunikasi yang jelas dan konsisten mengenai tujuan dan manfaat program sangat penting dalam memastikan kelancaran implementasi.

Teori Grindle menekankan bahwa keberhasilan implementasi program juga tergantung pada pengelolaan sumber daya secara efisien dan berkelanjutan. Di Desa Sumorame, diversifikasi sumber dana melalui program CSR, donasi lembaga, dan zakat masyarakat menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber anggaran. Hal ini mencerminkan pentingnya perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang adaptif terhadap perubahan situasi. Penyesuaian ini mendukung keberlanjutan program meskipun terdapat perubahan kebijakan atau kendala dana di masa depan.

Dalam konteks teori implementasi Grindle, pengelolaan sumber daya yang memadai sangat krusial untuk keberhasilan program, terutama dalam hal sumber daya manusia, dana, dan material. Pada program pencegahan stunting di Desa Sumorame, kader kesehatan berperan sebagai pelaksana utama yang berhubungan langsung dengan masyarakat, dengan tugas seperti memberikan edukasi, memantau status gizi balita, serta melaksanakan kegiatan seperti pemberian makanan tambahan (PMT). Efektivitas kader dipengaruhi oleh pelatihan yang diterima, motivasi kerja, serta ketersediaan alat yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Dalam hal ini, teori Grindle menekankan bahwa keberhasilan implementasi program sangat bergantung pada pengelolaan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, yang dapat memastikan kelancaran pelaksanaan program.

Selain itu, pemerintah desa berperan penting dalam mendukung implementasi melalui kebijakan yang proaktif dan alokasi dana desa yang cukup, yang digunakan untuk pelatihan kader, pembelian alat kesehatan, dan penyediaan bahan makanan bergizi. Ini sesuai dengan konsep teori Grindle yang menggarisbawahi peran penting kebijakan yang mendukung serta komunikasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan program. Pengelolaan anggaran yang transparan dan diversifikasi sumber dana melalui program CSR, zakat, dan donasi lembaga turut mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendanaan dan memastikan kelancaran program dalam jangka panjang. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana (2019) menekankan bahwa diversifikasi sumber dana, seperti menggandeng sektor swasta melalui program CSR dan dana lokal lainnya, dapat meningkatkan keberlanjutan program dan mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan tunggal [10].

VII. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program pencegahan stunting di Desa Sumorame telah memberikan dampak positif dalam mengurangi prevalensi stunting melalui berbagai intervensi, termasuk pemberian makanan tambahan (PMT), edukasi gizi, pendampingan ibu hamil, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Program ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan mendorong perubahan perilaku, seperti pola makan yang lebih sehat dan partisipasi aktif dalam kegiatan posyandu. Namun, penelitian juga mengungkap beberapa tantangan dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan tenaga ahli, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, dan fragmentasi kebijakan antara pemerintah lokal dan nasional. Edukasi masyarakat dan pelibatan lintas sektor menjadi faktor kunci keberhasilan, meskipun fragmentasi data dan kebijakan masih perlu diperbaiki. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan program. Dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi, diharapkan prevalensi stunting dapat terus menurun secara signifikan di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penyelesaian artikel ini, khususnya kepada perangkat Desa Sumorame, kader kesehatan, rekan-rekan sejawat, serta seseorang yang telah setia kebersamaan penulis dengan segala dukungan moral, referensi, dan bantuan teknis selama proses penelitian. Apresiasi tulus juga penulis tujukan kepada diri sendiri atas proses perjalanan pendewasaan diri bahwa pada akhirnya hidup bukanlah tentang saling mendahului, melainkan tentang keteguhan untuk terus melangkah mencapai mimpinya sendiri-sendiri. *“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia”*. Semoga dukungan dan kerja keras semua pihak menjadi nilai manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa depan.

REFERENSI

- [1] T. Y. Anasa, I. Kurnia, and S. S. Permana, “Implementasi Program Pencegahan Stunting di Desa Enu Kecamatan Sindue Kabupaten Donggala,” *J. Publ. Stud.*, vol. 01, no. 01, pp. 18–27, 2024.

- [2] Fitriani et al., “Cegah Stunting Itu Penting!,” *J. Pengabd. Kpd. Masy. Sosiosaintifik*, vol. 4, no. 2, 2022, doi: 10.54339/juridikmas.v4i2.417.
- [3] Z. Zurhayati and N. Hidayah, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita,” *JOMIS (Journal Midwifery Sci.)*, vol. 6, no. 1, 2022, doi: 10.36341/jomis.v6i1.1730.
- [4] A. Wulandari Leksono et al., “Risiko Penyebab Kejadian Stunting pada Anak,” *J. Pengabd. Kesehat. Masy. Pengmaskesmas*, vol. 1, no. 2, 2021.
- [5] Perpres, “Peraturan Presiden No. 28,” no. 1, 2020.
- [6] Y. Pratiwi, S. S. Firdaus, and F. S. Sadewo, “Konstruksi Sosial Masyarakat Tentang Stunting Pada Kawasan Kumuh di Kabupaten Sidoarjo,” *J. Pelayanan dan Pengabd. Masy.*, vol. 8, no. 1, pp. 65–74, 2024, doi: 10.52643/pamas.v8i1.2703.
- [7] P. R. Izzuddin and A. Widiyarta, “Strategi Pemerintah Desa dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo,” ... *J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 5, no. 2, pp. 971–986, 2024, [Online]. Available: <http://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/288%0Ahttps://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/288/119>
- [8] F. Muharram, “Efektivitas Program Kebijakan Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Sidoarjo,” *Ganaya J. Ilmu Sos. dan Hum.*, vol. 7, no. 3, pp. 379–391, 2024, doi: 10.37329/ganaya.v7i3.3486.
- [9] S. A. Fajar, C. D. Anggraini, and N. Husnul, “Efektivitas pemberian makanan tambahan pada status gizi balita Puskesmas Citeras, Kabupaten Garut,” *Nutr. Sci. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 30–40, 2022, doi: 10.37058/nsj.v1i1.5975.
- [10] A. D. Afrizal and I. Rodiyah, “Implementasi program literasi kesehatan dalam penanganan stunting di Desa Tambak Kalisogo,” *Publisia J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 8, no. 1, pp. 14–23, 2023, doi: 10.26905/pjiap.v8i1.8610.
- [11] Ananda Muhammad Tri Utama, “Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM Di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya,” vol. 9, no. 04, pp. 356–363, 2022.
- [12] I. Rasyad, I. D. Pramudiana, and S. Kamariyah, “Implementasi Penggunaan Dana Desa Pada Program Stunting di Desa Kemiri Kecamatan Sidoarjo,” *Soetomo Adm. Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 127–136, 2024.
- [13] Z. Athifah and A. R. Amelia, “Implementasi Program Pencegahan Stunting Di Puskesmas Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare Tahun 2023,” *J. Heal. Educ. Lit.*, vol. 6, no. 1, pp. 17–26, 2023, doi: 10.31605/j-healt.v6i1.2824.
- [14] D. Anggreni, L. A. Lubis, and H. Kusmanto, “Implementasi program pencegahan stunting di puskesmas Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara,” *Histeria J. Ilm. Soshum dan Hum.*, vol. 1, no. 2, pp. 91–99, 2022, doi: 10.55904/histeria.v1i2.281.
- [15] P. S. Rahmat, “Penelitian Kualitatif,” *Journal Equilibrium*, vol. 5 No. 9. 2009.
- [16] A. Rijali, “Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin,” vol. 17, no. 33, pp. 81–95, 2018.
- [17] M. R. Fadli, “Memahami desain metode penelitian kualitatif,” *HUMANIKA*, vol. 21, no. 1, 2021, doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.
- [18] S. Fatonah, “Implementasi Otonomi Desa dalam Pembangunan Sarana Olahraga di Desa Sungai Segajah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir,” pp. 1–23, 2016.
- [19] B. A. B. Ii and T. Pustaka, “Implementation as A Political and Administrative Procces .,” no. 1979, pp. 10–36, 2008.
- [20] B. M. Barat, “Peraturan Bupati Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur,” *Jdih.Manggarai Barat Kab.Go.Id*, 2019, [Online]. Available: https://jdih.manggarai Barat kab.go.id/senyum/jdih/file_hukum/Masterplan Smart City Kabupaten Manggarai Barat.pdf
- [21] R. Adolph, “Tinjauan Pustaka,” pp. 1–23, 2016.
- [22] L. Atamou, D. C. Rahmadiyah, H. Hassan, and A. Setiawan, “Analysis of the Determinants of Stunting among Children Aged below Five Years in Stunting Locus Villages in Indonesia,” *Healthc.*, vol. 11, no. 6, 2023, doi: 10.3390/healthcare11060810.
- [23] M. Ponum et al., “Stunting diagnostic and awareness: Impact assessment study of sociodemographic factors of stunting among school-going children of Pakistan,” *BMC Pediatr.*, vol. 20, no. 1, 2020, doi: 10.1186/s12887-020-02139-0.
- [24] H. L. W. Heri, “Implementasi Program Pencegahan Stunting Pemerintah Desa Sakra Selatan Dalam Upaya Menurunkan Prevalensi Stunting,” 2023, [Online]. Available: <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/34796%0Ahttp://eprints.unram.ac.id/34796/2/Jurnal Onoq.pdf>
- [25] M. Subekti, M. Faozanudin, and A. Rokhman, “Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak,” *Indones. J. Public Adm.*, vol. 3, no. 2, pp. 58–71, 2017, doi: 10.52447/ijpa.v3i2.923.

- [26] P. Utami and Welas, “Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Lokal Pada PT. Meiji Rubber Indonesia Kabupaten Bekasi) Merilee,” vol. 10, no. 2, pp. 71–76, 2019.
- [27] D. Rika Widianita, “Peran Pemerintah Desa Dalam Menurunkan Stunting (Studi Di Desa Pubasu Kecamatan Tobu Kabupaten Timor Tengah Selatan) Disusun,” AT-TAWASSUTH J. Ekon. Islam, vol. VIII, no. I, pp. 1–19, 2023.
- [28] A. Manongga, S. Pangemanan, and J. Kairupan, “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung,” J. Jur. Ilmu Pemerintah., vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2018.
- [29] D. I. Yani, L. Rahayuwati, C. W. M. Sari, M. Komariah, and S. R. Fauziah, “Family Household Characteristics and Stunting: An Update Scoping Review,” *Nutrients*, vol. 15, no. 1. 2023. doi: 10.3390/nu15010233.
- [30] M. A. L. Suratri et al., “Risk Factors for Stunting among Children under Five Years in the Province of East Nusa Tenggara (NTT), Indonesia,” *Int. J. Environ. Res. Public Health*, vol. 20, no. 2, 2023, doi: 10.3390/ijerph20021640.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.